

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (LKJiP)

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan. Kapten Arivai No 47 Palembang**

DAFTAR ISI

1.	PENDAHULUAN.....	2
II.	TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	4
2.	PERENCANAAN KINERJA	8
3.	AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
A.	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	17
A.	MENINGKATNYA AKSES DAN LAYANAN PENDIDIKAN MUTU PENDIDIKAN	19
B.	REALISASI ANGGARAN.	27
	REALISASI BELANJA TAHUN 2025.....	27
	PENUTUP	61

1. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pedoman resmi untuk menilai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan pembangunan pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025-2029, pendidikan merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi, sosial dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Pendidikan diharapkan dapat mendukung upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminatif, mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan, meningkatkan meningkatkan kualitas dan kemampuan peserta didik, kesetaraan gender, serta memperkuat nilai-nilai budaya. Pendidikan yang relevan dan berkualitas memainkan peran penting untuk meningkatkan daya saing regional, hal ini menuntut pendidikan agar mampu

melengkapi lulusannya untuk memiliki ketrampilan teknis, dan kemampuan berfikir analitis, berkomunikasi serta bekerjasama dalam tim.

Pendidikan erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Industri yang maju dan ekonomi yang berkembang karena ditunjang tingkat pendidikan yang tinggi dari masyarakatnya. Demikian juga penduduk miskin suatu daerah juga dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan. Pendidikan mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing dengan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan. Apabila masyarakat memiliki pengetahuan dan ketrampilan akan meningkatkan income/pendapatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan.

Guna mewujudkan hal tersebut diatas Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan capaian, tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Rundang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Salah satu pasal dalam undang-undang tersebut

menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Propinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan nomor: 52 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, dimana uraian tugas dan Fungsi yaitu ***“Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dibidang Pendidikan dan Tugas Pembantuan yang diserahkan kepada Provinsi”***,

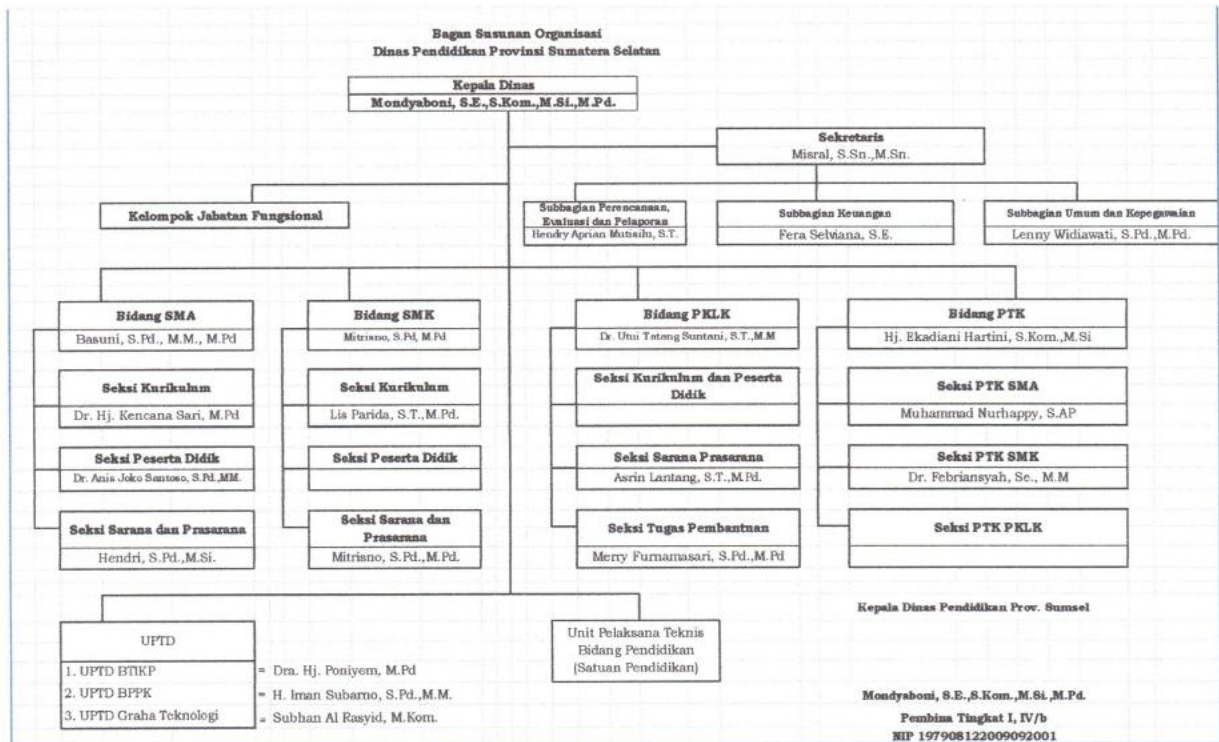
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, diatur dengan Perda Nomor 52 tahun 2016 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, dengan struktur organisasi terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
 - a. Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - b. Subbag Keuangan dan

- c. Subbag Umum dan Kepegawaian
- 3. Bidang Sekolah Menengah Atas, membawahi
 - a. Seksi Kurikulum SMA
 - b. Seksi Peserta Didik SMA
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana SMA
- 4. Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, membawahi
 - a. Seksi Kurikulum SMK
 - b. Seksi Peserta Didik SMK
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana SMK
- 5. Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, membawahi
 - a. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana
 - c. Seksi Tugas Perbantuan
- 6. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahi
 - a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas
 - c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional

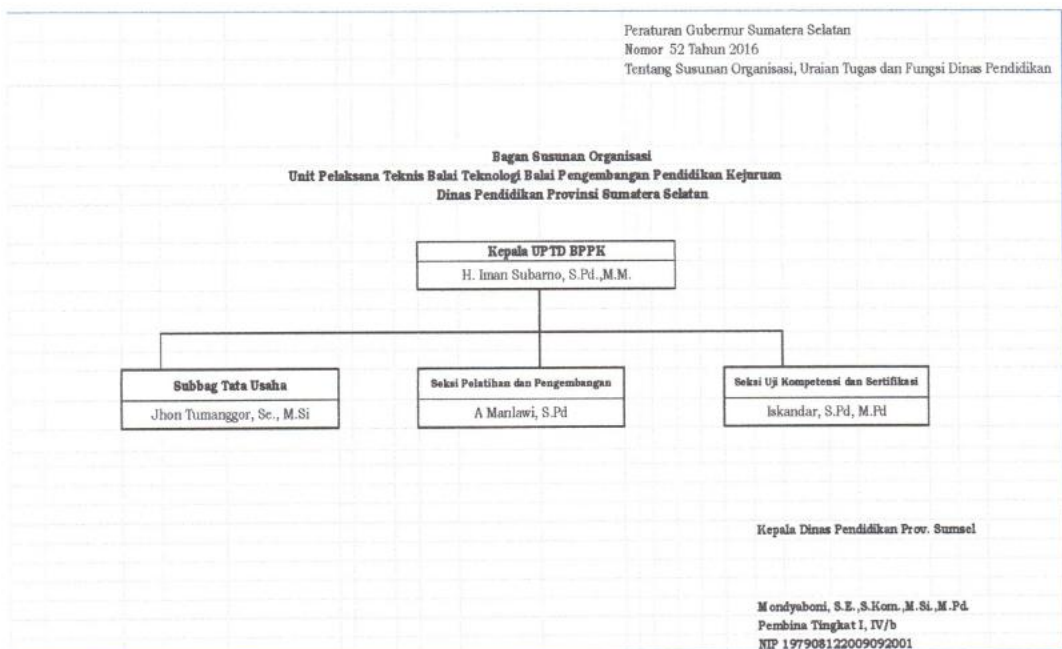
Beikut Ini Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan UPTD Dinas Pendidikan P

1. Bagan Struktur Organisasi pada Dians Pendidikan Prov Sumsel

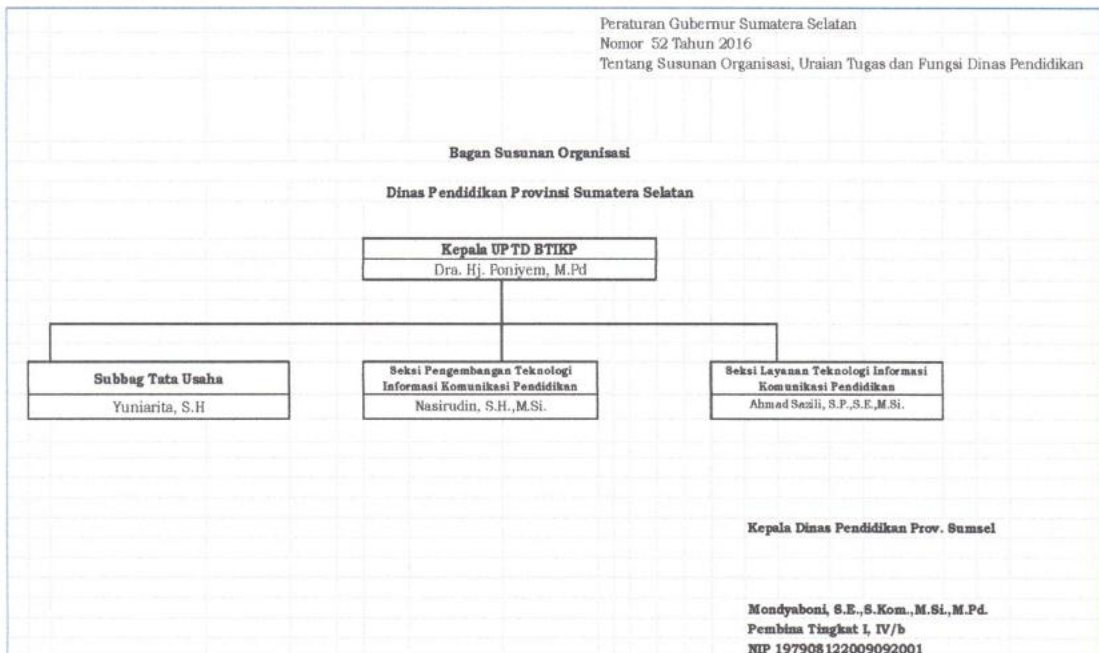


2. Bagan Struktur Organisasi pada UPTD

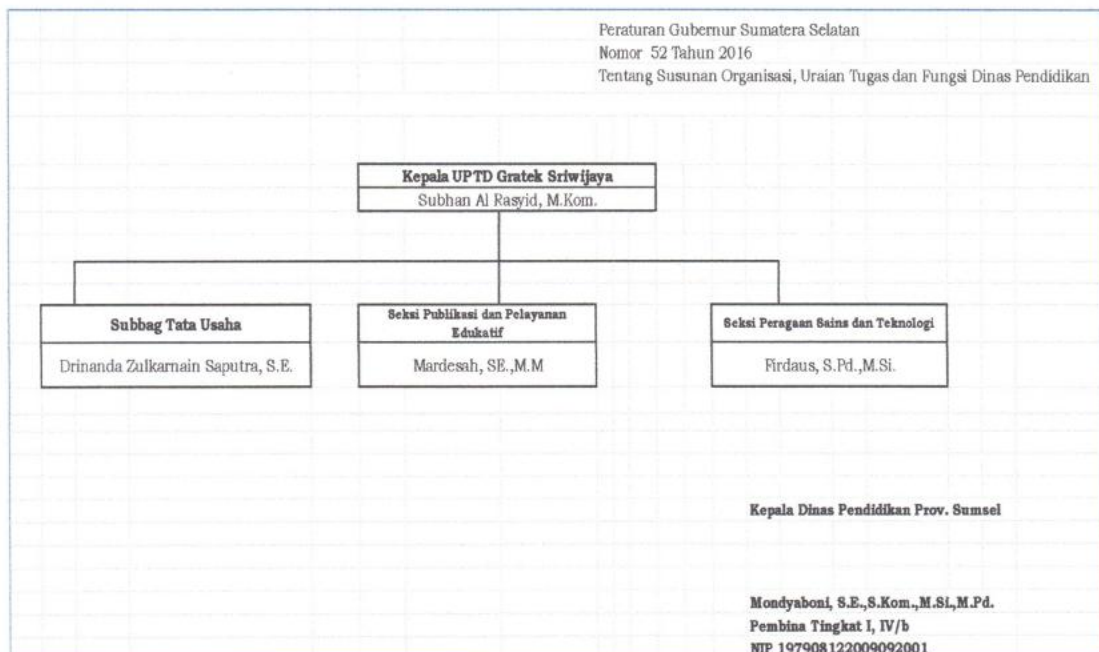
a) UPTD BPPK



b) UPTD BTIKP



c) UPTD Graha Teknologi Sriwijaya



2. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja (performance planning) merupakan suatu hal yang penting bagi terselenggaranya manajemen kinerja (performance management) yang baik.

Untuk tujuan ini, perencanaan kinerja menjadi suatu hal yang cukup kritikal yang harus dijadikan fokus perhatian oleh manajemen. Sejalan dengan hal tersebut Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai salah satu instansi sektor publik



mempunyai Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Visi dan Misi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan panduan yang memberikan arah dan panduan kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran dan target yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan prioritas pembangunan yang tertuang pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, di mana Dinas Pendidikan harus mencapai tujuan kinerja yaitu Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang tertuang kedalam Misi ke 1 yaitu Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing

Pembangunan bidang pendidikan tertuang pada misi I dengan tujuan meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan 3 (tiga) indikator dan 8 (delapan) sasaran pada program strategis yang ke 4 (empat) yaitu Pendidikan yang berkeadilan, dengan penjabaran Program Strategis sebagai berikut :

1. Melanjutkan program sekolah yang berkeadilan dan berkualitas
2. Meningkatkan sumber daya Pendidikan dan mendorong kurikulum bermuatan lokal
3. Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan guru
4. Melanjutkan program literasi dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan
5. Penyediaan Beasiswa Kuliah bagi Siswa Berprestasi

Untuk mencapai Misi ke 1 tujuan kinerja tersebut diatas, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dengan menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan digunakan dalam periode waktu tahun 2025-2029 sesuai periode Renstra, yang kemudian akan tertuang di dalam rencana kerja (renja) Dinas Pendidikan baik untuk pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai misi tersebut. Indikator kinerja utama Dinas Pendidikan yang telah tersusun sebagai berikut:

Tujuan dan sasaran tujuan:

1. Tujuan : Meningkatnya Kualitas Keterampilan dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Kewenangan Provinsi, dengan sasaran sebagai berikut :

I. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dengan indikator antara lain :

- a. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun
- b. Harapan Lama Sekolah
- c. Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi
- d. Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi
- e. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi
- f. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi
- g. Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan dalam Satu Tahun Setelah kelulusan

- h. Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi
 - i. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi
- II. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- A. Sasaran 1 : Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan, dengan indikator utama adalah sebagai berikut :
- a. Rata-Rata lama sekolah
 - b. Harapan Lama Sekolah
 - c. Indek Modal Manusia
 - d. Persentase Angka Partisipasi Sekolah (16-18 Tahun)(APS)
 - e. Persentase Angka Partisipasi Sekolah (4-18 Tahun) Penyandang Disabilitas (APS)
 - f. Persentase Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah
 - g. Persentase Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah
 - h. Sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi
 - i. Persentase Capaian SPM Pendidikan Menengah
 - j. Persentase Capaian SPM Pendidikan Khusus
 - k. Jumlah Siswa Miskin yang memperoleh Layanan Pendidikan
- B. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan, dengan indikator utama adalah sebagai berikut :
- a. Persentase Akreditasi SLB
 - b. Persentase Akreditasi Sekolah Menengah
 - c. Nilai Raport Pendidikan (Literasi, numerasi, iklim keamanan, iklim kebhinekaan, iklim inklusivitas) untuk jenjang SMA, SMK dan SLB
 - d. Persentase Peningkatan Kualifikasi pendidik
 - e. Jumlah Guru bersertifikasi
 - f. Jumlah Pendidik yang berprestasi nasional
 - g. Jumlah Siswa yang berprestasi nasional
 - h. Jumlah Siswa yang mengikuti Pembinaan Karakter
 - i. Jumlah Sekolah Unggulan

- j. Jumlah guru yang mengikuti pelatihan
- k. Jumlah Masyarakat yang menerima Beasiswa kuliah
- l. Jumlah siswa yang menerima makanan bergizi

Membuat "rencana kinerja" berarti membuat rencana mengenai output dan outcome yang akan dihasilkan oleh organisasi. Rencana yang hanya berfokus mengenai penggunaan input, pemilihan kegiatan, dan output yang akan dibuat, baru merupakan "rencana kerja". Instansi pemerintah belum disebut berkinerja sebelum dapat menunjukkan keberhasilan pencapaian outcome-nya. Namun demikian, outcome mungkin baru bisa dicapai setelah beberapa tahun kemudian. Sehingga instansi pemerintah mungkin baru benar-benar bisa menunjukkan keberhasilan kinerjanya setelah beberapa tahun kemudian. Untuk hal seperti ini, instansi pemerintah harus mampu menunjukkan hubungan antara output-output dan aktivitas yang telah dikerjakan setiap tahunnya dengan kinerja yang baru akan diperoleh di masa yang akan datang. Kapan kinerja tersebut dapat dicapai juga sudah harus direncanakan sejak awal. Apabila hal tersebut telah dipenuhi, instansi pemerintah tersebut telah dapat menyatakan output dan kegiatan tahunannya sebagai kinerja sementara dalam rangka mencapai kinerja sesungguhnya beberapa tahun kemudian.

Berkaitan dengan hal di atas, Dinas Pendidikan membuat perjanjian kinerja tahun 2025 untuk seluruh ASN di lingkungan Dinas Pendidikan dari Eselon 2 sampai dengan staf. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan dan staf yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan punishment atau sanksi.

Dalam rangka pencapaian perjanjian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 ini Dinas Pendidikan dalam mewujudkan pembangunan pendidikan di Sumatera Selatan dalam hal peningkatan akses pendidikan dan kualitas mutu pendidikan dirumuskan ke dalam program-program dan kegiatan dan Sub kegiatan seperti yang selaras dengan RPJMD dan RPJMN sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dengan rincian program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah dengan kegiatan sebagai berikut :
 - A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

- b. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- c. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- e. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
- D. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- E. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- F. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- G. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- H. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- I. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- H. Peningkatan Pelayanan BLUD, dengan sub kegiatan sebagai berikut
 - a. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2. Program pengelolaan pendidikan daerah dengan kegiatan sebagai berikut :
 - A. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
 - b. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
 - c. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - d. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
 - e. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
 - f. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
 - g. Pengadaan Mebel Sekolah
 - h. Pengadaan Perlengkapan Sekolah
 - i. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
 - j. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
 - k. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
 - l. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
 - m. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
 - n. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
 - o. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi

- p. Pembangunan Ruang Laboratorium
 - q. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium
 - r. Pembangunan Ruang Kelas Baru
- B. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
 - b. Pembangunan Ruang Praktik Siswa
 - c. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - d. Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
 - e. Pengadaan Mebel Sekolah
 - f. Pengadaan Perlengkapan Sekolah
 - g. Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
 - h. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
 - i. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
 - j. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
 - k. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
 - l. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
 - m. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
 - n. Pembangunan Ruang Kelas Baru
 - o. Rehabilitasi ruang kelas sekolah
- C. Pengelolaan Pendidikan Khusus, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - b. Pengadaan Mebel
 - c. Pengadaan Perlengkapan Sekolah
 - d. Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
 - e. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus
 - f. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

- g. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Khusus
 - h. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
 - i. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
 - j. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
 - k. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik
 - l. Pembangunan Ruang Kelas Baru
 - m. Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah
 - n. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
 - o. Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah
3. Program Pengembangan kurikulum daerah dengan kegiatan sebagai berikut :
- A. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
 - B. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
 - b. Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan kegiatan sebagai berikut:
- A. Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi, dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
 - b. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus

3. AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai dengan Permenpan nomor 53 tahun 2014 bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ini disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran, dan kebijakan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dan RENSTRA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara umum capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 cukup memuaskan dan disajikan pula informasi kinerja pembangunan pendidikan lainnya yang telah dicapai Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja pendidikan yang harus dicapai Dinas Pendidikan ada dua (2) tujuan yang harus dicapai, antara lain

1. Meningkatnya akses dan layanan pendidikan. Beberapa kebijakan yang telah diambil oleh Dinas Pendidikan antara lain penerimaan PPDB jalur afirmasi, Pendidikan gratis di sekolah berasrama, pendanaan Pendidikan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat pada pendidikan, ketersediaan ruang kelas, rehabilitasi ruang kelas, Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan
2. Meningkatnya kualitas pendidikan. Beberapa kebijakan yang telah diambil oleh Dinas Pendidikan
 - a. Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan pada satuan Pendidikan
 - b. Meningkatnya Kualitas Prasarana Pendidikan pada satuan Pendidikan

- c. Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- d. Meningkatnya Kualitas kurikulum pada proses belajar mengajar
- e. Meningkatnya Kualitas Peserta Didik
- f. Meningkatnya kualifikasi Pendidik dan tenaga kependidikan

Terkait capaian kinerja pada Dinas Pendidikan Sumatera Selatan dengan tujuan yang ingin dicapai di dalam RPJMD adalah Meningkatnya Kualitas Keterampilan dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Kewenangan Provinsi yang tertuang di dalam Indikator Sasaran pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan penjabaran, target dan capaian sebagai berikut :

I. Target dan capaian pada Indikator Kinerja Kunci

- A. Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan, dengan indikator sasaran sebagai berikut:
 - a) Rata-Rata lama sekolah (RLS)
 - b) Harapan Lama Sekolah (HLS)
- B. Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan, dengan indikatoe sasaran sebagai berikut:
 - a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi
 - b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi
 - c) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi
 - d) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi
 - e) Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan dalam Satu Tahun Setelah kelulusan
 - f) Proporsi persentase penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi
 - g) Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi

Berikut ini target dan capaian dari IKK Dinas Pendidikan tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan/Sasaran		Indikator Sasaran		Satuan	2025		Faktor Penghambat/Pendorong
						Target	Capaian	
1	Meningkatnya Kualitas Keterampilan dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Kewenangan Provinsi							
	1.1	Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan	1.1	Rata-Rata lama sekolah (RLS)	Tahun	8,65	8,91	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan
			1.2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,67	12,65	Biaya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi
	2.1	Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan	2.1	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi	%	5,88-11,76	4,66	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan
			2.2	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	%	0-5,88	5,66	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan
			2.3	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi	%	41,7	66,93	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan
			2.4	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	%	43,44	58,24	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan
			2.5	Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan dalam Satu Tahun Setelah kelulusan	%	82,54	80,89	Ada yang memilih untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya
			2.6	Proporsi persentase penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	%	8,88	8,4	Lebih Memilih untuk bekerja
2.7			Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	%	74,46	85,06	Peningkatan kualitas layanan Vokasi	

II. Target dan capaian pada IKU

A. MENINGKATNYA AKSES DAN LAYANAN PENDIDIKAN MUTU PENDIDIKAN

Untuk sasaran strategis pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan indikator yang ingin dicapai antara lain :

1. Meningkatkan Indeks Modal Manusia
2. Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (16-18 Tahun)(APS)
3. Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (4-18 Tahun) Penyandang Disabilitas (APS)
4. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar
5. Meningkatkan Angka Partisipasi Murni
6. Meningkatkan Sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi
7. Meningkatkan Persentase Capaian SPM Pendidikan Menengah
8. Meningkatkan Persentase Capaian SPM Pendidikan Khusus

9. Meningkatnya Jumlah Siswa Miskin yang memperoleh Layanan Pendidikan
10. Meningkatnya Persentase Akreditasi SLB
11. Meningkatnya Persentase Akreditasi Sekolah Menengah
12. Meningkatnya Nilai Raport Pendidikan
13. Meningkatnya Persentase Peningkatan Kualifikasi pendidik
14. Meningkatnya Jumlah Guru bersertikasi
15. Meningkatnya Jumlah Siswa yang mengikuti Pembinaan Karakter
16. Meningkatnya Jumlah Sekolah Unggulan
17. Meningkatnya Jumlah guru yang mengikuti pelatihan
18. Meningkatnya Jumlah Masyarakat yang menerima Beasiswa kuliah
19. Meningkatnya Jumlah Sekolah yang menerima makanan bergizi

Dari Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan tersebut tersusun atas target dan capaian untuk tahun 2025, dengan target dan capaian sebagai berikut :



NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Realisasi	Capaian	Faktor Penghambat / Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan Mutu Pendidikan					
A	Akses dan Layanan Pendidikan					
1	Indek Modal Manusia	angka	0	74,56		Peningkatan Kualitas Hidup manusia
2	Angka Partisipasi Sekolah (16-18 Tahun)(APS)	%	100	73,78	73,78	Masih terdapat siswa yang belum terlayani
3	Angka Partisipasi Sekolah (4-18 Tahun) Penyandang Disabilitas (APS)	%	100	60,36	60,36	Masih terdapat siswa yang belum terlayani
4	Angka Partisipasi Kasar	%	98,36	97,86	99,49	Peningkatan kualitas pendidikan
5	Angka Partisipasi Murni	%	75,72	65,06	85,92	Peningkatan kualitas pendidikan
6	Sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi	Sekolah	95	116	122,11%	Peningkatan Kerjasama dengan sekolah umum dalam menerima anak berkebutuhan khusus
7	Persentase Capaian SPM Pendidikan Menengah	%	100	99,33	99,33%	Masih terdapat angka putus sekolah
8	Persentase Capaian SPM Pendidikan Khusus	%	100	60,36	60,36%	Masih terdapat angka putus sekolah
9	Jumlah Siswa Miskin yang memperoleh Layanan Pendidikan	Orang	300	324	108,00%	Penambahan Ruang Kelas dan asrama

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Realisasi	Capaian	Faktor Penghambat / Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan Mutu Pendidikan					
B	Mutu Pendidikan					
10	Persentase Akreditasi SLB					
	Akreditasi A	%	11	17	154,55	Peningkatan kualitas pendidikan
	Akreditasi B	%	44	43	97,73	Peningkatan kualitas pendidikan
	Akreditasi C	%	25	26	104	Peningkatan kualitas pendidikan
	Akreditasi D	%	20	0	0	Peningkatan kualitas pendidikan
11	Persentase Akreditasi Sekolah Menengah					
	Akreditasi A	%	43	32,74	76,15	Peningkatan kualitas pendidikan
	Akreditasi B	%	38	36,38	95,74	Peningkatan kualitas pendidikan
	Akreditasi C	%	15	27,13	180,87	Peningkatan kualitas pendidikan
	Akreditasi D	%	4	1,56	38,98	Peningkatan kualitas pendidikan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Realisasi	Capaian	Faktor Penghambat / Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	Nilai Raport Pendidikan					
	SMA					
	Kemampuan literasi	Nilai	67,53	66,93	99,11	Perlu peningkatan sdm pendidikan
	Kemampuan numerasi	Nilai	59,84	58,24	97,33	Perlu peningkatan sdm pendidikan
	Indeks iklim keamanan	Nilai	79,16	70,45	89,00	Perlu peningkatan sdm pendidikan
	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	72,01	71,01	98,61	Perlu peningkatan sdm pendidikan
	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	60,26	58,76	97,51	Perlu peningkatan sdm pendidikan
	SMK					
	Kemampuan literasi	Nilai	66,39	65,09	98,04	Perlu peningkatan sdm pendidikan
	Kemampuan numerasi	Nilai	59,02	56,82	96,27	Perlu peningkatan sdm pendidikan
	Tingkat penyerapan lulusan SMK	Nilai	81,46	80,89	99,30	Perlu peningkatan sdm pendidikan
	Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Nilai	85,6	85,06	99,37	Perlu peningkatan sdm pendidikan
	Indeks iklim keamanan	Nilai	70,27	69,07	98,29	Perlu peningkatan sdm pendidikan
	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	70,95	69,25	97,60	Perlu peningkatan sdm pendidikan
	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	59,33	57,03	96,12	Perlu peningkatan sdm pendidikan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Realisasi	Capaian	Faktor Penghambat / Pendorong
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Nilai Raport Pendidikan					
	SDLB					
	Indeks iklim keamanan	Nilai	76,7	76,2	99,35	Perlu peningkatan sdm pendidikan
	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	71,67	70,67	98,60	Perlu peningkatan sdm pendidikan
	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	68,3	67	98,10	Perlu peningkatan sdm pendidikan
	Kemampuan literasi	Nilai	59,66	58,06	97,32	Perlu peningkatan sdm pendidikan
	Kemampuan numerasi	Nilai	57,25	56,65	98,95	Perlu peningkatan sdm pendidikan
	SMPLB					
	Indeks iklim keamanan	Nilai	70,2	69	98,29	Perlu peningkatan sdm pendidikan
	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	74,21	72,41	97,57	Perlu peningkatan sdm pendidikan
	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	69,52	68,12	97,99	Perlu peningkatan sdm pendidikan
	Kemampuan literasi	Nilai	65,3	64,8	99,23	Perlu peningkatan sdm pendidikan
	Kemampuan numerasi	Nilai	57,98	57,73	99,57	Perlu peningkatan sdm pendidikan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Realisasi	Capaian	Faktor Penghambat / Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Nilai Raport Pendidikan					
	SMALB					
	Kemampuan literasi	Nilai	60,91	60,41	99,18	Peningkatan kualitas pendidikan
	Kemampuan numerasi	Nilai	57,68	57,18	99,13	Peningkatan kualitas pendidikan
	Indeks iklim keamanan	Nilai	75,3	74	98,27	Peningkatan kualitas pendidikan
	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	72,9	70,8	97,12	Peningkatan kualitas pendidikan
	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	66,8	65,2	97,60	Peningkatan kualitas pendidikan
13	Persentase Peningkatan Kualifikasi pendidik	%	98,5	98,9	100,41%	Peningkatan Kualifikasi Guru
14	Jumlah Guru bersertikasi	Orang	11.420	11.565	101,27	Penambahan jumlah guru bersertifikat
15	Jumlah Siswa yang mengikuti Pembinaan Karakter	orang	100	300	300%	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan
16	Jumlah Sekolah Unggulan	Sekolah	0	1	100,00%	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan
17	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan	Orang	325	1500	100,00%	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan
18	Jumlah Sekolah yang menerima makanan bergizi	Orang	229.537	325.126	100,00%	Peningkatan jumlah penerima

Dari tabel target dan capaian diatas dapat kita jelaskan bahwa ada capaian yang telah melebihi dari target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk meningkatkan pelayanan baik dalam peningkatan akses dan layanan pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan, tetapi ada juga beberapa capaian yang memang masih ada di bawah dari target yang telah ditetapkan hal ini memang masih sangat membutuhkan kerja keras yang sangat maksimal dalam pencapaian target yang memang telah ditetapkan baik di dalam RPJMD maupun di dalam Renstra, kami berkomitmen dan berkeyakinan akan meningkatkan capaian yang telah ditetapkan dan akan terus melakukan pembenahan kinerja untuk pencapaian akses dan kualitas mutu pendidikan

B. REALISASI ANGGARAN.

REALISASI BELANJA TAHUN 2025

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun anggaran 2025 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. **2.868.880.713.669,00**, dan telah terealisasi sebesar **Rp 2.742.998.193.859,50** (95,61 %) yang terserap untuk operasional dan belanja modal, dengan penjelasan sebagai berikut.

No	Anggaran Per Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
A	Belanja Operasi	2.702.509.810.043,00	2.573.529.651.815,50	128.980.158.227,50
1	Belanja Pegawai	1.886.942.028.400,00	1.803.554.763.017,00	83.387.265.383,00
2	Belanja Barang dan Jasa	541.597.381.753,00	492.211.144.852,00	49.386.236.901,00
3	Belanja Hibah	273.970.399.890,00	277.763.743.946,00	-3.793.344.056,00
B	Belanja Modal	166.370.903.626,00	169.468.542.044,00	-3.097.638.418,00
TOTAL		2.868.880.713.669,00	2.742.998.193.859,00	166.438.812.479,00

1. Untuk Belanja operasional pada tahun 2025 alokasi anggaran sebesar Rp 2.702.509.810.043,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 2.573.529.651.815,00 atau 95,22%, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai dengan pagu Rp 1.886.942.028.400,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 1.803.554.763.017,00
 - b. Belanja Barang dan Jasa dengan pagu Rp 541.597.381.753,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 492.211.144.852,00
 - c. Belanja Hibah dengan pagu Rp 273.970.399.890,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 277.763.743.946,00
2. Belanja Modal dengan pagu Rp 166.370.903.626,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 169.468.542.044,00

Berikut ini Pagu dan Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2025

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	PAGU	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN		Rp.2.868.880.713.669	Realisasi Keuangan Sebesar Rp. 2.742.998.193.859,5 atau 95,61% dengan sisa pagu anggaran Rp. 125.882.519.809,5			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan transparansi (100%)	Rp.1.850.095.505.110	Realisasi Keuangan Program Kegiatan Sebesar Rp. 1.770.977.374.276,5 atau 95,72% dengan sisa pagu anggaran Rp. 79.118.130.833,5			
				<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Meningkatnya Persentase Sistem Capaian Kinerja Perencanaan yang baik dan transparansi (100%)	<i>Rp.695.180.000</i>	Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp. 364.814.079 atau 54,80% dengan sisa pagu anggaran Rp. 502.528.208 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		

No	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	PAGU	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Lap Kinerja, SPM dan Dapodik)	Rp.22.600.000	Realisasi Keuangan Sub kegiatan Sebesar Rp. 12.563.500 atau 55,59 % dengan sisa pagu anggaran Rp.10.036.500 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Manajemen Pendanaan Pendidikan SMA, SMK dan SLB, Dewan Pendidikan)	Rp.255.000.000	Realisasi Keuangan Sub kegiatan Sebesar Rp. 160.125.500 atau 62,79 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 94.874.500 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Manajemen Pendanaan Pendidikan SMA, SMK dan SLB, Dewan Pendidikan)	Rp.417.580.000	Realisasi Keuangan Sub kegiatan Sebesar Rp. 192.125.079 atau 46,01 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 225.454.921 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		

No	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	PAGU	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Meningkatnya laporan keuangan yang baik (100%)	<i>Rp..1.840.262.794.000</i>	Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp. 1.513.916.928.531 atau 70,53% dengan sisa pagu anggaran Rp. 50.374.518.203			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran gaji PNS dan tunjangan lainnya	Rp..1.829.524.048.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 1.821.048.075.238 atau 99,54% dengan sisa pagu anggaran Rp. 8.475.972.762 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Pada SMA/SMK, Pada Dinas Pendidikan, Pada SLB, Pada BTK, tutor SKJ)	Rp.9.113.336.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 8.016.798.000 atau 87,97% dengan sisa pagu anggaran Rp. 1.096.538.000 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		

No	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	PAGU	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pengelola kegiatan dan pejabat pengadaan	Rp.245.000.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 240.576.000 atau 98,19 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 4.424.000 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp.1.000.000.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 492.266.000 atau 49,23 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 507.734.000 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.170.000.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 167.007.551 atau 98,24 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 2.992.449 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	PAGU	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (transfer pusat , Manajemen Kualifikasi)	Rp.160.660.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 112.599.400 atau 70,09 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 48.060.600 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Monev dan pelaporan)	Rp.49.750.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 8.783.330 atau 47,46% dengan sisa pagu anggaran Rp. 40.966.670 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		
				<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	Meningkatnya Persentase Sistem Capaian Kinerja Pengadministrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (100%)	<i>Rp.516.634.260</i>	Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp. 478.063.270 atau 93,17 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 38.570.990 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		

No	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	PAGU	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp.153.664.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 122.750.500 atau 79,88% dengan sisa pagu anggaran Rp.30.913.500 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		
				Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.115.600.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 113.639.200 atau 98,30 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 1.960.800 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.159.090.260	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 157.195.650 atau 98,81 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 1.894.610 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		

No	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	PAGU	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.88.280.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 84.477.920 atau 95,69 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 3.802.080 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		
				<i>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat</i>	Meningkatnya Persentase Sistem Capaian Kinerja Pengadministrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (100%)	<i>Rp.44.000.000</i>	Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp.14.000.000 atau 31,82 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 30.000.000			
				Pelaporan Pengelolaan Retrebusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp.44.000.000	Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp.14.000.000 atau 31,82 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 30.000.000	Potensi Pendapatan Belum maksimal	Banyak Publikasi ke masyarakat terutama terkait penggunaan gedung serbaguna sebagai potensi pendapatan	
				<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Meningkatnya Persentase Aparatur yang Meningkat Kapasitasnya (100%)	<i>Rp.1.210.375.000</i>	Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp. 757.781.267 atau 50,24 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 452.593.733 dan Realisasi fisik sebesar 75 %			

No	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	PAGU	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp.405.145.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 51.938.492 atau 12,82 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 353.206.508 dan Realisasi fisik sebesar 50 %	Ada Kegiatan yang tidak terlaksana terkait Diklat PKA/PKP	Pendataan Pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan yang belum mengikuti PKA/PKP agar dapat mengikuti diklat	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Pelatihan ICT, Pelatihan Kepala Bengkel, Pelatihan Media, Asesor, Pengembangan dan Pemanfaatan TIK, Uji Kompetensi, Pelatihan Robotik)	Rp.805.230.000	Realisasi Keuangan Sub kegiatan Sebesar Rp. 705.842.775 atau 87,66 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 99.387.225 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		
				<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Meningkatnya Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (100%)	<i>Rp.685.210.000</i>	Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp. 517.239.050 atau 83,41 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 167.97.0950 dan Realisasi fisik sebesar 100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	PAGU	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rp.84.000.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 83.609.000 atau 99,53 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 3.910.00 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (ATK, Konsumsi, Jasa Iklan/Reklame)	Rp.382.500.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 250.525.420 atau 65,50 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 131.974.580 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Rp.105.210.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 105.131.484 atau 99,93 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 78.516 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	PAGU	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.113.500.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 77.973.146 atau 90,12% dengan sisa pagu anggaran Rp. 35.526.854 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang bergungsi baik (100 %)	Rp.1.227.800.000	Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp. 1.210.963.157 atau 98,59 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 16.836.843 dan Realisasi fisik sebesar 100%			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.271.000.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 267.625.767 atau 98,75 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 3.374.233 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	PAGU	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlag Pengadaan yang di laksanakan pada UPTD	Rp.956.800.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 943.337.390 atau 98,59 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 13.462.610 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		
				<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Meningkatnya Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (100%)	<i>Rp.2.961.550.000</i>	Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp. 2.675.442.648 atau 96,65 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 286.107.352 an Realisasi fisik sebesar 100%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat kedinasan	Rp.60.000.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 60.000.000 atau 100 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 0 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	PAGU	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik	Rp.2.845.200.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 2.559.092.648 atau 89,94 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 286.107.352 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.56.350.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 56.350.000 atau 0 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 0 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		
				<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Meningkatnya Persentase Sarana dan Prasarana yang bergungsi baik (100 %)	<i>Rp.2.428.461.850</i>	Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp. 2.075.469.750 atau 60,28 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 352.992.100 dan Realisasi fisik sebesar 100%			

No	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	PAGU	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas	Rp.547.920.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 433.430.700 atau 79,10 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 114.489.300 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Rp.107.435.600	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 10.435.600 atau 9,71 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 97.000.000 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Hutang Pembayaran	Percepatan Pelaksanaan kegiatan agar tidak menjadi hutang pekerjaan tahun selanjutnya	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dinas)	Rp.1.773.106.250	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 1.631.603.450 atau 92,02 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 141.502.800 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Hutang Pembayaran pemeliharaan	Percepatan Pelaksanaan kegiatan agar tidak menjadi hutang pekerjaan tahun selanjutnya	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	PAGU	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				<i>Peningkatan Pelayanan BLUD</i>	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	<i>Rp.63.500.000</i>	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 0 atau 0% dengan sisa pagu anggaran Rp. 63.500.000 dan Realisasi fisik sebesar 0%			
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Rp.63.500.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 0 atau 0% dengan sisa pagu anggaran Rp. 63.500.000 dan Realisasi fisik sebesar 0%	Kegiatan tidak terlaksana karena BLUD yang ada belum masuk di Perda Pendapatan	Sinkronisasi dengan Bappenda untuk dapat menjalankan BLUD Pada Satuan Pendidikan	
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	SPM Pendidikan Menengah (100 %),	Rp.1.016.962.895.559	Realisasi Keuangan Program Kegiatan Sebesar Rp. 970.502.642.211 atau 95,43% dengan sisa pagu anggaran Rp. 46.460.253.348			
				<i>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</i>	Angka Partisipasi Sekolah (100%)	<i>Rp.558.828.485.994</i>	Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp. 532.258.812.649 atau 95,25 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 23.667.163.028			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	PAGU	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah sekolah yang mendapat Pembangunan ruang guru/ Kepala sekolah/tu	Rp.777.797.444	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 693.470.350 atau 89,16 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 84.327.094 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Hutang Pembayaran pemeliharaan	Percepatan Pelaksanaan kegiatan agar tidak menjadi hutang pekerjaan tahun selanjutnya	
				Pembangunan PeRp.ustakaan Sekolah	Jumlah PeRp.ustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Rp.899.594.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 731.559.850 atau 81,32 % dengan sisa pagu anggaran Rp.168.034.150 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Terdapat Hutang	Percepatan Pelaksanaan kegiatan agar tidak menjadi hutang pekerjaan tahun selanjutnya	
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp.1.134.147.660	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 534.373.850 atau 47,12 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 599.773.810 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Terdapat Hutang	Percepatan Pelaksanaan kegiatan agar tidak menjadi hutang pekerjaan tahun selanjutnya	

No	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	PAGU	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang bangunan sekolah SMA yang di rehab	Rp.3.348.488.638	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 2.140.131.950 atau 63,91% dengan sisa pagu anggaran Rp. 1.208.356.688 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Terdapat Hutang	Percepatan Pelaksanaan kegiatan agar tidak menjadi hutang pekerjaan tahun selanjutnya	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Rp.1.841.183.988	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp.1.617.537.450 atau 0% dengan sisa pagu anggaran Rp. 223.646.538 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Terdapat Hutang	Percepatan Pelaksanaan kegiatan agar tidak menjadi hutang pekerjaan tahun selanjutnya	
				Rehabilitasi Sedang/ Berat PeRp.ustakaan Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapat Rehabilitasi sedang/berat PeRp.ustakaan Sekolah	Rp.882.750.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 346.131.750 atau 39,21 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 536.6182.50 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Terdapat Hutang	Percepatan Pelaksanaan kegiatan agar tidak menjadi hutang pekerjaan tahun selanjutnya	

No	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	PAGU	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Meubiler SMA yg diadakan	Rp.1.845.623.988	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 1.833.569.440 atau 99,35 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 12.054.548 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Rp.1.176.226.038	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 651.157.476 atau 55,36 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 100.004.476.000 dan Realisasi fisik sebesar 100 %	Terdapat Hutang	Percepatan Pelaksanaan kegiatan agar tidak menjadi hutang pekerjaan tahun selanjutnya	
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Rp.2.826.621.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 2.676.895.155 atau 94,70 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 149.725.845 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	PAGU	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Rp.186.991.645.250	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 168.578.054.034 atau 90,15% dengan sisa pagu anggaran Rp. 18.413.591.216 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Rp.961.125.750	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 898.954.077 atau 93,53 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 62.171.673 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Rp.14.912.852.100	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 13.770.889.915 atau 92,34 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 1.141.962.185 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		

No	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	PAGU	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Rp.336.690.320.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 325.117.436.813 atau 96,56 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 11.572.883.187 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Rp.87.000.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 86.410.000 atau 99,32 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 5.900.00 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		
				Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Rp.42.825.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 0 atau 0% dengan sisa pagu anggaran Rp. 0 dan Realisasi fisik sebesar 0%	Kegiatan tidak terlaksana	Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dengan bidang terkait	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	PAGU	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah ruang lab yang dibangun	Rp.33.510.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 33.510.000 atau 100 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 0 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Rp.323.500.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 150.322.000 atau 46,47 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 173.178.000 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Terdapat Hutang	Percepatan Pelaksanaan kegiatan agar tidak menjadi hutang pekerjaan tahun selanjutnya	
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas yang dibangun	Rp.4.053.275.138	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 3.775.814.950 atau 93,15 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 277.460.188 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Terdapat Hutang	Percepatan Pelaksanaan kegiatan agar tidak menjadi hutang pekerjaan tahun selanjutnya	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	PAGU	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				<i>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</i>	Angka Partisipasi Sekolah (100%)	<i>Rp.423.190.456.390</i>	Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp. 407.142.923.952 atau 96,21 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 16.047.532.438			
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Rp.1.444.500.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 1.201.006.350 atau 83,14 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 243.493.650 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Terdapat Hutang	Percepatan Pelaksanaan kegiatan agar tidak menjadi hutang pekerjaan tahun selanjutnya	
				Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Rp.2.789.186.850	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 2.404.233.490 atau 86,20 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 384.953.360 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Terdapat Hutang	Percepatan Pelaksanaan kegiatan agar tidak menjadi hutang pekerjaan tahun selanjutnya	
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Rp.2.019.596.750	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 1.923.389.750 atau 95,24 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 96.207.000 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	PAGU	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Rp.1.367.500.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 881.803.950 atau 64,48 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 485.696.050 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Terdapat Hutang	Percepatan Pelaksanaan kegiatan agar tidak menjadi hutang pekerjaan tahun selanjutnya	
				Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Rp.1.876.270.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 1.869.351.756 atau 99,63 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 6.918.244 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Rp.639.515.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 586.004.200 atau 91,63,% dengan sisa pagu anggaran Rp. 53.510.800 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	PAGU	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Rp.41.124.000.000	Realisasi Keuangan Sub kegiatan Sebesar Rp. 40.337.046.343 atau 98,09% dengan sisa pagu anggaran Rp. 786.953.657 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Rp.164.963.265.140	Realisasi Keuangan Sub kegiatan Sebesar Rp. 150.573.038.904 atau 91,28% dengan sisa pagu anggaran Rp. 14.390.226.236 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Rp.1.771.365.000	Realisasi Keuangan Sub kegiatan Sebesar Rp. 1.430.463.506 atau 98,31% dengan sisa pagu anggaran Rp. 340.901.494 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		

No	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	PAGU	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Rp.358.413.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 262.944.214 atau 73,36 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 95.468.786 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Rp.1.671.919.100	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 1.630.757.964 atau 97,54 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 41.161.136 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	Rp.198.691.056.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 199.874.361.065 atau 100,60 % dengan sisa pagu anggaran Rp. dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		

No	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	PAGU	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Rp.78.000.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 77.823.260 atau 99,77 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 176.740 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Rp.2.300.287.200	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 2.122.160.450 atau 92,26 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 178.126.750 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Terdapat Hutang	Percepatan Pelaksanaan kegiatan agar tidak menjadi hutang pekerjaan tahun selanjutnya	
				Rehabilitasi ruang kelas sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Rp.2.095.582.350	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 1.968.518.750 atau 93,94 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 127.063.600 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Terdapat Hutang	Percepatan Pelaksanaan kegiatan agar tidak menjadi hutang pekerjaan tahun selanjutnya	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	PAGU	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				<i>Pengelolaan Pendidikan Khusus</i>	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus (100%)	<i>Rp.34.943.953.175</i>	Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp. 31.100.905.610 atau 89,00% dengan sisa pagu anggaran Rp. 3.843.047.565			
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Rp.459.120.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 30.905.000 atau 6,73 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 428.215.000 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Terdapat Hutang	Percepatan Pelaksanaan kegiatan agar tidak menjadi hutang pekerjaan tahun selanjutnya	
				Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Rp.840.000.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 824.937.220 atau 98,21 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 150.627.800 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah yang tersedia	Rp.312.500.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 0 atau 0% dengan sisa pagu anggaran Rp. 312.500.000 dan Realisasi fisik sebesar 0%	Kegiatan tidak terlaksana	Koordinasi dan sinkronisasi	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	PAGU	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Rp.300.600.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 230.213.800 atau 76,58 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 70.386.200 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Rp.3.000.000.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 2.798.500.000 atau 93,28 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 201.500.000 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Rp.7.599.265.675	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 6.354.180.708 atau 83,62 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 1.245.084.967 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		

No	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	PAGU	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Rp.239.852.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 237.410.170 atau 98,98 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 2.441.830 dan, Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Rp.7.237.255.500	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 7.064.551.612 atau 97,61 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 172.703.888 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	Rp.12.065.700.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan 105,17 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 0 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	PAGU	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Rp.64.500.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 41.420.000 atau 64,22 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 23.080.000 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		
				Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	Rp.81.100.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 80.373.000 atau 99,10 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 727.000 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	Rp.937.120.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 279.112.000 atau 29,78 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 658.008.000 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Terdapat Hutang	Percepatan Pelaksanaan kegiatan agar tidak menjadi hutang pekerjaan tahun selanjutnya	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	PAGU	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Rp.996.000.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 279.112.000 atau 29,78 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 658.008.000 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Terdapat Hutang	Percepatan Pelaksanaan kegiatan agar tidak menjadi hutang pekerjaan tahun selanjutnya	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Rp.365.920.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 112.552.000 atau 30,76 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 410.221.000 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Terdapat Hutang	Percepatan Pelaksanaan kegiatan agar tidak menjadi hutang pekerjaan tahun selanjutnya	
				Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	Rp.445.020.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 34.799.000 atau 7,28 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 673.748.900 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Terdapat Hutang	Percepatan Pelaksanaan kegiatan agar tidak menjadi hutang pekerjaan tahun selanjutnya	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	PAGU	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Penerapan Kurikulum Merdeka (100%)	Rp.353.503.000	Realisasi Keuangan Program Kegiatan Sebesar Rp. 220.152.000 atau 62,28 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 133.351.000			
				<i>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah</i>	Persentase Penerapan Kurikulum dengan muatan lokal (60%)	<i>Rp.239.400.000</i>	Realisasi Keuangan Program Kegiatan Sebesar Rp. 115.290.000 atau 48,16 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 112.176.244			
				Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	Rp.239.400.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 115.290.000 atau 48,16 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 124.110.000 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		
				<i>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus</i>	Persentase Penerapan Kurikulum dengan muatan lokal (60%)	<i>Rp.114.103.000</i>	Realisasi Keuangan Program Kegiatan Sebesar Rp. 104.862.000 atau 91,90 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 9.241.000	Tidak Terdapat Permasalahan		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	PAGU	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya	Rp.114.103.000	Realisasi Keuangan Program Kegiatan Sebesar Rp. 104.862.000 atau 91,90 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 9.241.000 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		
				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik Berkualifikasi Minimal D-IV/S-1 (98,65 %)	Rp.1.468.810.000	Realisasi Keuangan Program Kegiatan Sebesar Rp. 1.298.025.372 atau 88,37 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 170.784.628			
				<i>Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Provinsi</i>		<i>Rp.1.468.810.000</i>	Realisasi Keuangan Program Kegiatan Sebesar Rp. 1.298.025.372 atau 88,37 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 170.784.628			
				Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Rp.583.860.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 542.895.000 atau 92,98 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 40.965.000 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	PAGU	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Rp.884.950.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 755.130.372 atau 88,27% dengan sisa pagu anggaran Rp. 129.819.628 dan Realisasi fisik sebesar 100%	Tidak Terdapat Permasalahan		
				TOTAL ANGGARAN		Rp.2.868.880.713.669	Realisasi Keuangan Sebesar Rp. 2.742.998.193.859,5 atau 95,61% dengan sisa pagu anggaran Rp. 125.882.519.809,5			

PENUTUP

Peran pendidikan dalam pertumbuhan ekonomi akan terlihat ketika penambahan tenaga kerja yang memiliki produktivitas tinggi, tenaga kerja produktivitas hasil pendidikan yang baik akan melahirkan peningkatan keluaran atau output dengan demikian pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara khusus pendidikan berperan penting dalam pertumbuhan industri, sebagai penggerak pendidikan menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil, proses kerja yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambah. Melalui pendidikan di harapkan dapat membentuk manusia yang berkualitas sebagaimana dicita-citakan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Masih banyak aspek yang perlu penanganan khusus dan kerjasama antara pemerintah daerah dan provinsi terutama dalam peningkatan sarana dan prasaran penunjang seperti keberadaan Laboratorium dan Perpustakaan yang masih kurang di banyak sekolah.

Perlunya pemerataan sebaran guru di 17 Kab/Kota terutama guru PNS, karena didapati ketimpangan jumlah guru antar sekolah di semua daerah yang dapat memperlambat laju percepatan mutu dan kualitas pendidikan di Sumatera Selatan. Kesulitan akses untuk mencapai sekolah dan kualitas sekolah yang tidak memadai menjadi penyebab utama baik dari guru untuk bertugas di daerah, maupun siswa yang akan bersekolah.

Implementasi dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah dalam bidang pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat untuk secara bersama-sama mengembangkan pendidikan. Dengan demikian keberhasilan pendidikan

bukanlah keberhasilan pemerintah semata tetapi keberhasilan bersama sehingga semua masalah yang muncul dalam pendidikan harus dicari solusinya bersama-sama dan menjadi tanggung jawab bersama.

Demikian laporan kami semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan,



MONDYABONI, S.E.,S.Kom.,M.Si,.M.Pd
Pembina TK.I, IV/b
NIP 19790812 200909 2001